

BANGKITNYA STUDI ISLAM DALAM PENGELOLAAN WISATA SYARIAH DI PANTAI UJUNG TAPE PINRANG

THE RISE OF ISLAMIC STUDIES DEALING SHARIA TOURISM MANAGEMENT IN UJUNG TAPE BEACH PINRANG

Arnis Thamrin¹, Arqam², Muzdalifah Muhammadun³

^{1 2 3} Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

E-mail: arnisthamrin@iainpare.ac.id, arqam@iainpare.ac.id,
muzdalifahmuhammadun@iainpare.ac.id

Abstract

Expressions of the rise of Islam in the era of globalization are still ambiguous and are understood differently by various people. This article aims to reaffirm the rise of Islamic studies in the management of sharia tourism in Ujung Tape Pinrang Beach. Less than optimal management is the cause of quality governance issues, on the other hand inadequate facilities and lack of awareness of managers are urgent matters to achieve sharia criteria. Therefore, planning issues and inhibiting factors are two things that will be investigated. The investigation was carried out using qualitative methods, case studies. Data obtained through observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed by induction with the help of data triangulation and theory. The results of the study show that tourism management at Ujung Tape Beach has not been carried out holistically and collaboratively, while the obstacles are a) inadequate infrastructure; b) budget constraints; c) limited land; d) lack of community participation and awareness. The solution to this problem, this article proposes to be oriented towards the common good, implement the DSN-MUI Fatwa regarding the implementation of sharia tourism and take best practices for implementing halal tourism which are implemented in West Nusa Tenggara.

Keywords: management; maslahah; sharia tourism

Abstrak

Ekspresi atas kebangkitan Islam di era globalisasi masih ambigu dan dipahami berbeda oleh berbagai orang. Artikel ini bertujuan untuk menegaskan kembali kebangkitan studi islam dalam pengelolaan wisata syariah di Pantai Ujung Tape Pinrang. Kurang optimalnya pengelolaan menjadi penyebab dalam permasalahan tata kelola yang berkualitas, di lain hal fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya kesadaran pengelola menjadi hal urgent untuk mencapai kriteria syariah. Oleh karenanya, masalah perencanaan dan faktor penghambat adalah dua hal yang akan dilakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan dengan metode kualitatif, studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara induksi dengan bantuan triangulasi data dan teori. Hasil penelitian meunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di Pantai Ujung Tape belum dilakukan secara holsitik dan kolaboratif, sementara penghambatnya a) infrastruktur yang belum memadai; b) keterbatasan anggaran; c) keterbatasan lahan; d) kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat. Solusi atas masalah tersebut, artikel ini mengajukan untuk berorientasi pada kemaslahatan bersama, mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI tentang penyelenggaraan wisata syariah dan mengambil *best practices* pelaksanaan wisata halal yang diterapkan di Nusa Tenggara Barat.

Kata kunci: pengelolaan; maslahat; wisata syariah

1. Pendahuluan

Ekspresi atas kebangkitan Islam di era globalisasi masih ambigu dan dipahami berbeda oleh berbagai orang¹. Umumnya, sebagian besar orang menganggap Islam hanyalah identitas keagamaan. Padahal Islam melampaui, tidak hanya sebagai simbol keagamaan dengan simbolisasi Mekah dan Ka'bah, tetapi juga menjadi solusi atas permasalahan di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Pandangan ambiguitas terhadap Islam semakin dikaburkan dengan realitas revolusi media dengan keterbukaan informasi atau dikenal dengan istilah disruptsi. Globalisasi dan disruptsi media membuat kekaburuan dalam memahami Islam, karena itu penstudi islam (*islamic studies*) perlu menegaskan kebangkitan Islam, indstri halal, dan belakangan pariwisata syariah melalui riset yang terjadi di wilayah lokal kepada publik internasional.

Pinrang adalah wilayah peisisir bagian Barat di Sulawesi Selatan. Nama Pinrang dalam publikasi riset pariwisata masih kurang dibanding dengan Toraja yang sudah berlangsung sejak tahun 1980-an. Toraja dan etnik Toraja diperkenalkan dalam riset global oleh seorang antropolog asal Amerika Serikat yang mengkristal pada Kathleen Adams², tentang komunitas lokal di sana.³ Meskipun nama Pinrang dengan etnis Bugis dan Mandar yang mendiami wilayah itu diulas oleh Steve Druce⁴ dan Christian Pelras⁵, namun diskusi tentang pariwisata di Pinrang belum dipublikasikan secara eksplisit seperti bidang studi lain, yakni sejarah, arekologi, dan budaya.

Diskusi bidang pariwisata khususnya pariwisata syariah di Pinrang mulai dibahas dalam penelitian mahasiswa tahun 2021 dan dipublikasikan tahun 2022. Hal ini dapat dilihat dalam publikasi riset yang dilakukan Nur Azizah dkk tentang penerapan prinsip hotel syariah⁶, Putriawati dkk tentang tradisi *sayang pattudu* sebagai bagian atraksi wisata syariah di Desa Lero⁷, dan Nirwana Alda dkk menganalisis dampak

¹ Gerald R Hawting, "The Rise of Islam," *A Companion to the History of the Middle East*, 2005, 9–27.

² Kathleen M Adams, "Come to Tana Toraja,'Land of the Heavenly Kings': Travel Agents as Brokers in Ethnicity," *Annals of Tourism Research* 11, no. 3 (1984): 469–85.

³ Kathleen M Adams et al., "(Post-) Pandemic Tourism Resiliency: Southeast Asian Lives and Livelihoods in Limbo," in *Recentering Tourism Geographies in the 'Asian Century'* (Routledge, 2022), 267–88.

⁴ Stephen C Druce, *The Lands West of the Lakes: A History of the Ajattappareng Kingdoms of South Sulawesi, 1200 to 1600 CE*, vol. 261 (Brill, 2009).

⁵ Christian Pelras, *The Bugis* (John Wiley & Sons, 1997).

⁶ N Azizah, M N Hamang, and Hannani, "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL SYARIAH ATIQA PINRANG," *Shi'ar: Sharia Tourism ...* 01, no. 01 (2022): 01–16, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/shiar/article/view/3243>.

⁷ P Putriawati, M K Zubair, and Bahtiar, "TRADISI SAYYANG PATTU'DU'DALAM PENGEMBANGAN WISATA SYARIAH DI DESA LERO KABUPATEN PINRANG," *Shi'ar: Sharia Tourism ...* 01, no. 01 (2022): 17–29, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/shiar/article/view/3245>.

pandemi Covid-19 terhadap *travel agent* umrah dan haji di Pinrang⁸. Dalam mendukung hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas pengelolaan wisata di Pantai Ujung Tape Pinrang. Perbedaan utama dengan penelitian sebelumnya, artikel ini membahas pengelolaan wisata syariah di Pantai Ujung Tape untuk menarik kunjungan wisatawan.

Pantai Ujung Tape merupakan salah satu pantai berpasir putih yang terletak di Mattiro Sompe, 30 menit dari Ibu Kota Kabupaten Pinrang. Aktivitas wisata yang dilakukan di pantai ini adalah piknik, *camping, jogging, gathering*, dan untuk hanya sekedar menikmati keindahan Pantai. Pantai Ujung Tape dikelola oleh pemerintah desa dan juga melibatkan masyarakat sekitar. Di Pantai Ujung Tape tersedia fasilitas yang menunjang kegiatan wisata, seperti cafe, mushalla, toilet, dan parkiran. Namun, kondisi fasilitas wisata tersebut memprihatinkan. Bangunan yang tidak terawat mulai dari ruang ganti, kamar mandi tidak layak lagi untuk digunakan. Kamar mandi dan bangunan kini tersisa balok yang sudah lapuk, bahkan sebagian bangunan ada yang sudah roboh, dan dibiarkan begitu saja. Sudah beberapa tahun Pantai Ujung Tape tidak terawat, keberadaanya tidak lagi menjadi magnet bagi pengunjung, baik bagi wisatawan luar daerah maupun masyarakat Kabupaten Pinrang sendiri.

Kondisi di atas diperparah dengan pengelolaan sampah yang selama ini menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional tidak hanya lokal. Pengelolaan sampah diperlukan kepastian serta kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran masyarakat, sehingga pengelolaannya bisa berjalan efektif dan efisien. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana bentuk pengelolaan Pantai Ujung Tape dalam meningkatkan kunjungan wisatawan?; 2) Mengapa terjadi hambatan dalam pengelolaan wisata syariah di Pantai Ujung Tape? Rumusan masalah tersebut dijawab dengan bantuan kerangka teori manajemen dan konsep wisata halal⁹ dengan pendekatan *maqasid syariah*¹⁰ modern, yang berorientasi pada kemaslahatan, menghindari kemusrikan, menghindari maksiat, dan menjaga kelestarian lingkungan.

⁸ N Alda, M Syarifuddin, and S Kadir, "DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA USAHA BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMRAH DI KABUPATEN PINRANG," *Shi'ar: Sharia Tourism ...* 01, no. 01 (2022): 81–102, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/shiar/article/view/3262>.

⁹ Alfonso Vargas-Sánchez and María Moral-Moral, "Halal Tourism: Literature Review and Experts' View," *Journal of Islamic Marketing* 11 (June 4, 2019), <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2017-0039>.

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIT), 2008).

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Studi kasus didefinisikan sebagai penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer (kasus) secara mendalam dan dalam konteks dunia nyata¹¹. Penggunaan teori dan proposisi teori dalam melakukan riset studi kasus dapat menjadi bantuan yang sangat besar dalam menentukan desain penelitian yang tepat dan data yang akan dikumpulkan¹². Selain menggunakan teori managemen, penelitian ini menggunakan *maslahah based theories*, menurut Al-Sadir penggunaan teori maslahah didasarkan pada metode induksi (*logical base induction*)¹³, dari hal yang khusus ke umum atau universal.

Sumber data diperoleh pada bulan Juli-Agustus 2021 melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada 7 orang informan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif¹⁴ dengan cara induksi melalui triangulasi data dan teori¹⁵.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengelolaan Pantai Ujung Tape :

Pantai Ujung Tape adalah daya tarik wisata yang paradoks. Dikatakan paradoks karena pantai ini merupakan pantai yang memiliki nilai sejarah dan potensi wisata yang dimiliki dapat menarik kunjungan wisatawan. Namun, pengelolaan Pantai Ujung Tape belum optimal dikarenakan beberapa fakta yang ditemukan di lapangan. Selama ini pengelolaan wisata di Pantai Ujung Tape belum dikelola secara syariah atau memenuhi kriteria standar syariah pada khususnya pada pelayanan dan pengelolaan. Dengan kata lain, pengelolaan Pantai Ujung Tape masih dilaksanakan secara konvensional.

Pantai Ujung Tape yang banyak memiliki potensi untuk dikelola agar menjadi daya tarik yang diminati banyak wisatawan. Seperti yang dikatakan Bapak Fajrin Ardiansyah selaku Lurah dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

Selain Bapak Fajrin Ardiansyah, hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Hafidah mengatakan bahwa :

“ Pantai Ujung Tape juga sudah ada roda perputaran UMKM yaitu sekretariat pokdarwis yang dikatakan Teras Pantai Ujung Tape. Pengelolaannya kita kumpulkan pelaku UMKM yang berada di

¹¹ Trista Hollweck, “Robert K. Yin. (2014). Case Study Research Design and Methods (5th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 282 Pages.” *The Canadian Journal of Program Evaluation* 1, no. 2014 (2016): 108–10, <https://doi.org/10.3138/cjpe.30.1.108>.

¹² K.Robert Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Los Angeles: Los Angeles: SAGE, 2014).

¹³ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

¹⁴ John Ward Creswell, *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, 4th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

¹⁵ Kurt Wüthrich, *Triangulation in Social Research: Qualitative and Quantitative Methods Can Really Be Mixed, Developments in Sociology*, 2004.

Kelurahan Pallameang kemudian di situlah nanti di pasarkan berbagai kuliner, contohnya mie titi viral, kemudian diundanglah orang-orang besar seperti Bapak Bupati, Kapolres makanya terpublikasi."

Selain kuliner yang disediakan dan dikelola oleh UMKM di sana, pengeloaan wisata Pantai Ujung Tape juga dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Pallemang berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata. Koordinasi yang dilakukan adalah terkait kebutuhan yang dapat menambah kegiatan atau aktivitas wisatawan. Kebutuhan sarana dan prasarana untuk aktivitas wisata diusulkan melalui proposal kepada Dinas Pariwisata atau sebaliknya usulan sudah diprogramkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pinrang.

" Kegiatan yang mendukung pengelolaan pantai ujung tape, yaitu kegiatan yang akan usulkan seperti pengadaan *banana boat*, *jet sky* dan juga tradisi pallameang salah satunya balapan perahu yang selalu diadakan di setiap tahunnya, tanggal 24 juli nantinya Insya Allah akan diadakan, perencanaan pembangunan sarana dan prasarana, kemudian pengembangan daerah tujuan wisata."

Berdasarkan pernyataan di atas, usulan kegiatan untuk kebutuhan sarana dan prasarana di Pantai Ujung Tape belum merepresentasikan atribut daya tarik wisata halal. Padahal tren wisata syariah yang dilegitimasi fatwa DSN -MUI No. 108 Tahun 2016 mengatakan bahwa daya tarik wisata syariah setidaknya harus memenuhi kebutuhan wisatawan muslim seperti tempat ibadah yang nyaman, sementara tempat ibadah yang tersedia di Pantai Ujung Tape belum memadai karena kurangnya perawatan fasilitas wisata sebagaimana terurai pada bagian pendahuluan.

Sejatinya, pengelolaan wisata di Pantai Ujung Tape memang masih konvensional. Mengingat berdasarkan wawancara dengan Encik Fajrin Ardiansyah bahawa

"Kami belum bisa mengatakan kalau Pantai Ujung tape sudah termasuk objek wisata syariah dikarenakan belum ada penguatan tentang syariah di wisata ini dan belum menerapkan konsep pariwisata syariah."

Berdasarkan hasil wawancara maka ditemukan fakta tentang pengelolaan wisata di Pantai Ujung Tape belum memenuhi kriteria syariah. Hal ini dikarenakan belum adanya penguatan melalui sosialisasi dan pembinaan kepada stakeholders pariwisata di sana. Meskipun telah teradapat kelompok sadar wisata dan usaha jasa pariwisata, namun pemahaman tentang wisata syariah belum banyak diketahui, sehingga atribut utama dalam pariwisata syariah belum dijadikan perhatian utama dalam usulan kegiatan untuk kebutuhan sarana dan prasarana, termasuk perawatan fasilitas yang ada di Pantai Ujung Tape.

Padahal pengelolaan wisata syariah semestinya berbasis kepada kemaslahatan bersama. Kemaslahatan juga harus sejalan dengan tujuan syariat serta seimbang antara dunia ni dan akhirat. Artinya, pengelolaan wisata Pantai Ujung Tape tidak hanya untuk memenuhi minat wisatawan untuk aktivitas bersenang-senang, tetapi juga kebutuhan spiritual dengan tersedianya tempat ibadah dan sarana penunjang yang

nyaman bagi wisatawan dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, pengelolaan pariwisata syariah betujuan untuk menjaga dan mempertahankan maslahat agama.¹⁶

3.2 Hambatan dalam Pengelolaan Pantai Ujung Tape

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan fakta yang menghambat pengelolaan wisata syariah di Pantai Ujung Tape. *Pertama*, Infratsruktur. Wisatawan memerlukan infrastruktur atau fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhannya selama berada di objek wisata, sehingga kelengkapan destinasi wisata dan kualitas pelayanan dalam fasilitas tersebut diperlukan untuk mendorong perkembangan pariwisata. Kurang tersedianya sarana dan prasarana wisata berupa bangunan, penginapan, pusat informasi, biro perjalanan, tempat bermain anak-anak, bahaya erosi pantai tinggi, sarana dan prasarana wisata kurang memadai kebersihan lingkungan yang kurang terjaga, ketersediaan air yang kurang mencukupi kebutuhan wisatawan. Ketersediaan fasilitas penunjang kurang memadai seperti kuliner yang memiliki lebel halal dari MUI, Tambahan pula, masalah tempat sampah yang usdah tersedia, namun jumlahnya perlu diperbanyak dengan radius setiap 25 Meter. Seperti yang dikatakan Bapak Fajrin Ardiansyah dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Awal Maret 2020 diberitakan di media bahwa Pantai Ujung tape merupakan salah satu pantai pembuangan sampah di Pinrang, dan setelah ditelusuri memang benar. Pantai ini juga dikategorikan laut lepas, makanya gelombangnya tinggi, kemudian seringnya terjadi abrasi apalagi tanggul pantai juga ada beberapa yang roboh dan bocor.”

Senada yang dikatakan oleh Samsiah bahwa :

“Rencana kita akan mengadakan musyawarah untuk membahas kelengkapan fasilitas untuk Pantai Ujung Tape seperti mushollah, penginapan, tempat makan makanan berat, pos keamanan, penyediaan air bersih, tempat sampah dan juga perbaikan jalan dan tanggul yang sempat mengalami kerusakan.”

Kedua, keterbatasan anggaran dan kewenangan. Anggaran dalam pengelolaan objek wisata sangat penting, setiap objek wisata membutuhkan dana yang cukup besar dalam pengelolaan objek wisata. Rendahnya alokasi belanja untuk sektor pariwisata ini telah membatasi aktivitas kepariwisataan. Keterbatasan anggaran berimplikasi terhadap kurang memadainya sarana dan prasarana serta infrastruktur penunjang kegiatan kepariwisataan lainnya. Karena anggaran yang disediakan belum cukup untuk pengelolaan. Hal ini akan berdampak secara singnifikan pada pengelolaan Pantai Ujung Tape. Belum lagi masalah kewenangan untuk proyeksi anggaran dilakukan oleh siapa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Supardi Umar menyatakan bahwa :

“Tanggul pantai yang ingin kita perbaiki dengan anggaran pemerintah itu tidak bisa, karena aset dari balai besar jeneberang makassar, makanya harus dia yang rekontruksi pantai Ujung Tape.”

¹⁶ Muhammad Rusdi Ali, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam,” *Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2019): 151–68.

Senada yang dikatakan oleh Fajrin Ardiansyah bahwa:

“ Kalau dari segi potensi tentu saja kita punya itu tetapi untuk mengembangkan objek wisata itu kan juga perlu anggaran yang tidak sedikit.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa salah satu hambatan dalam pengelolaan pariwisata adalah keterbatasan anggaran untuk biaya sarana dan prasarana objek wisata.

Ketiga, keterbatasan lahan. Salah satu punca kendala dalam pengelolaan objek wisata Pantai Ujung Tape adalah masalah pengadaan tanah, akibat masalah tanah yang masih dimiliki penduduk, maka pemerintah terhambat dalam mengelola sarana dan prasarana yang ada. Seperti yang dikatakan Mariani dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Tidak mudah untuk melakukan pengelolaan dikarenakan banyak rumah-rumah warga yang ada di sekitar Pantai Ujung Tape.”

Hal senada juga dikatakan Amar bahwa:

“Sebelum melakukan perluasan lahan baiknya di adakan dulu musyawarah dengan warga yang memiliki tempat tinggal di pesisir pantai jika bersedia untuk dihibahkan atau dijual ke pengelola wisata maka pasti akan terjadi perluasan lahan dan tentunya ada negoisasi terlebih dahulu dan pun tidak mau maka tidak bisa dipaksakan.”

Keempat, kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ataupun pengelolaan pariwisata bukan hanya berarti pengarahan tenaga kerja masyarakat secara sukarela, akan tetapi justru lebih penting adalah tergeraknya masyarakat untuk mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan mau memperbaiki kualitas hidupnya. Partisipasi berarti peran serta dalam proses pengelolaan objek wisata baik dalam bentuk kegiatan, serta ikut memanfaatkan objek wisata yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Seperti yang dikatakan Amar selaku masyarakat pesisir Pantai saat wawancara bersama peneliti mengatakan bahwa:

“Salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan Pantai Ujung Tape adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan pariwisata, sehingga membuat pendapat masyarakat berbeda-beda.

Apalagi di Kelurahan Pallameang ini tidak pernah diadakan sosialisasi tentang wisata.”

Dengan demikian, tidak adanya sosialisasi yang intensif dan berkala membuat masyarakat belum memahami pariwisata dengan baik dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, dibutuhkan, sosialisasi terutama mengenai wisata syariah, dengan begitu pemahaman masyarakat yang menilai wisata itu hanya jalan-jalan dan makan-makanan direduksi dengan pelayanan berbasis keramah-tamahan, pelayanan yang beretika, dan pelayanan untuk kemaslahatan bersama.

3.3 Solusi berdasarkan Konsep Wisata Halal

Terminologi wisata halal muncul berawal dari aktivitas wisatawan yang dimotivasi nilai religi dengan berkunjung tempat peribadatan, pemakaman, atau tempat religi yang bernilai historis. Pada awalnya, wisata halal disebut sebagai wisata religi. Istilah lain dari wisata halal adalah wisata syariah, destinasi wisata ramah halal, atau destinasi wisata ramah muslim. Istilah lain wisata halal juga disebutkan oleh Abdul Kadir Jaelani bahwa wisatawan muslim melakukan perjalanan ke a tempat untuk meningkatkan akidah mereka dan mengamalkan prinsip keislaman mereka.¹⁷

Di Indonesia, kriteria wisata halal belum datur oleh hukum positif melalui undang-undang. Peraturan pariwisata hanya membahas Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, bukan pariwisata syariah atau halal. Penyelenggaran pariwisata syariah diatur oleh Fatwa DSN MUI No. 108 tentang pariwisata syariah. Meskipun belum diatur oleh hukum positif secara nasional, namun beberapa daerah telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang wisata halal, salah satu yang paling sentral adalah Perda Wisata Hala di Nusa Tenggara Barat. Perda tersebut tidak saja mengacu pada konsep wisata halal, melainkan menjelaskan kriteria, standar yang harus penuhi indstri pariwisata konvensional, dan sanksi apabila tidak menerapkan aturan tersebut.

Berpijak pada konsep wisata halal yang dilandasi *maqasid syariah* dan *best practices* peraturan daerah tentang wisata halal di NTB, artikel ini merusumuskan solusi alternatif terhadap permasalahan dalam pengelolaan di Pantai Ujung Tape. Berikut ini adalah solusi pengelolaan wisata syariah yang dapat diterapkan di Pantai Ujung Tape.

1. Pelaksanaan pengelolaan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan: a) pengelolaan sarana dan prasarana untuk pengembangan berupa *travel agent*, hotel, restoran, *tour operator*, pelayanan kesehatan, faktor keamanan dan petugas yang langsung melayani wisatawan; b) Meningkatkan kegiatan promosi dengan mengadakan acara event tahunan balap perahu, memanfaatkan sosial media dan juga membuat akun tersendiri untuk wisata tersebut seperti akun youtube, facebook dan instagram.
2. Ruang lingkup pengelolaan di Pantai Ujung Tape tidak hanya pada pengelolaan destinasi, pemasaran dan promosi, tetapi juga pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan. Pembiayaan ini tentunya didasarkan atas usulan perencanaan dari pengelola berdarkan kriteria kebutuhan wisatawan muslim.
3. Standar syariah di Pantai Ujung Tape meliputi produk, pelayanan, dan pengelolaan.

¹⁷ A K Jaelani et al., "The Impact of Corona Virus on Supply Chain of Halal Tourism Management in West Nusa Tenggara," *International Journal of Supply Chain Management* 9, no. 5 (2020): 823–31, https://www.academia.edu/download/64748223/5594_16083_1_PB.pdf.

4. Dalam hal standar syariah sebagaimana dimaksud pada nomor 2 belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi: a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci; b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah; c. tersedia makanan dan minuman halal; b. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan c. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.
5. Indsutri pariwisata konvensional yang ada di Kabupaten Pirang perlu meyediakan : a. arah kiblat di kamar hotel; b. informasi masjid terdekat; c. tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim; d. keterangan tentang produk halal/tidak halal; e. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan; f. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan g. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.
6. Pengelola yang melanggar ketentuan mendapat sanksi, dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; dan/atau g. denda administratif.
7. Pengelolaan pariwisata syariah wajib terhindar dari kemusyikan, kemaksiatan, kemafsadatan.

Ketujuh poin di atas, bertujuan agar pengelolaan wisata menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Ajaran agama dibangun atas maslahat untuk direalisasikan dan menangkal peluang munculnya *mudharat*.¹⁸ Keberadaan penstudi pariwisata syariah yang membawa konsep wisata syariah dan mensosialisasikannya merupakan upaya untuk menangkal peluang munculnya *mudharat* di daya tarik wisata atau objek wisata. Hal ini juga membuktikan bahwa studi islam dan pariwisata tidak berada di persimpangan jalan, melainkan membuka jalan untuk bangkit bahwa *islamic studies* dan pariwisata adalah agenda baru dalam penelitian kontemporer.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Perencanaan pengelolaan pantai ujung tape dalam meningkatkan daya tarik wisatawandi Kecamatan Mattiro Sompe, Kab. Pinrang yaitu roda perputaran UMKN yaitu sekretariat pok darwis yang dikatakan Teras Pantai Ujung Tape, kerjasama dengan pihak pemerintah desa dengan masyarakat dalam mempromosikan objek wisata pantai ujung tape, dan mengoptimalkan tingkat kebersihan pada daya tarik pantai ujung tape

¹⁸ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat Dan Kaidahnya* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam pengelolaan pantai ujung tape dalam meningkatkan daya tarik wisatawan: a) infrastruktur yang belum memadai; b) keterbatasan anggaran; c) Keterbatasan Lahan; d) kurangnya partisipasi dan kesadaran.

Adapun saran yang diajukan adalah berpijak pada solusi alternatif yang diajukan pada sub-bab 3.3, kemudian untuk meningkatkan kualitas pengelolaan daya tarik wisata, maka sebaiknya juga pengelola meningkatkan kualitas-kuantitas sarana dan prasarana yang memperhatikan produk dan atribut, serta standar wisata syariah. Selain itu, Pemerintah lokal juga tidak hanya membuat strategi pengelolaan secara umum, tetapi membuat strategi khusus dalam pengelolaan pariwisata berbasis syariah.

Referensi

Al-Qu’ran Al-Karim

Adams, Kathleen M. "Come to Tana Toraja,'Land of the Heavenly Kings': Travel Agents as Brokers in Ethnicity." *Annals of Tourism Research* 11, no. 3 (1984): 469–85.

Adams, Kathleen M, Jaeyeon Choe, Mary Mostafanezhad, and Giang Thi Phi. "(Post-) Pandemic Tourism Resiliency: Southeast Asian Lives and Livelihoods in Limbo." In *Recentering Tourism Geographies in the 'Asian Century,'* 267–88. Routledge, 2022.

Alda, N, M Syarifuddin, and S Kadir. "DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA USAHA BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMRAH DI KABUPATEN PINRANG." *Shi'ar: Sharia Tourism ...* 01, no. 01 (2022): 81–102. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/shiar/article/view/3262>.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

Azizah, N, M N Hamang, and Hannani. "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL SYARIAH ATIQA PINRANG." *Shi'ar: Sharia Tourism ...* 01, no. 01 (2022): 01–16. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/shiar/article/view/3243>.

Bedong, Muhammad Ali Rusdi. *Maslahat Dan Kaidahnya*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Creswell, John Ward. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Druce, Stephen C. *The Lands West of the Lakes: A History of the Ajattappareng Kingdoms of South Sulawesi, 1200 to 1600 CE*. Vol. 261. Brill, 2009.

Hawting, Gerald R. "The Rise of Islam." *A Companion to the History of the Middle East*, 2005, 9–27.

Hollweck, Trista. "Robert K. Yin. (2014). Case Study Research Design and Methods (5th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 282 Pages." *The Canadian Journal of Program Evaluation* 1, no. 2014 (2016): 108–10. <https://doi.org/10.3138/cjpe.30.1.108>.

Jaelani, A K, I G Ayu, K Rachmi, and L Karjoko. "The Impact of Corona Virus on Supply Chain of Halal Tourism Management in West Nusa Tenggara." *International Journal of Supply Chain Management* 9, no. 5 (2020): 823–31. https://www.academia.edu/download/64748223/5594_16083_1_PB.pdf.

Pelras, Christian. *The Bugis*. John Wiley & Sons, 1997.

Putriawati, P, M K Zubair, and Bahtiar. "TRADISI SAYYANG PATTU'DU'DALAM PENGEMBANGAN WISATA SYARIAH DI DESA LERO KABUPATEN PINRANG." *Shi'ar: Sharia Tourism ...* 01, no. 01 (2022): 17–29. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/shiar/article/view/3245>.

Rusdi Ali, Muhammad. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam." *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2019): 151–68.

Vargas-Sánchez, Alfonso, and María Moral-Moral. "Halal Tourism: Literature Review and Experts' View." *Journal of Islamic Marketing* 11 (June 4, 2019). <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2017-0039>.

Wüthrich, Kurt. *Triangulation in Social Research: Qualitative and Quantitative Methods Can Really Be Mixed. Developments in Sociology*, 2004.

Yin, K.Robert. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Los Angeles: los Angeles: SAGE, 2014.